



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2024

DISUSUN OLEH:
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

T

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU TRIWULAN I
TAHUN 2024**

A. Pengantar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini meliputi 6 Program yaitu :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
 - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 4. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

- 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Hasil Monev Internal

1. Sekretaris Badan :

Anggaran yang dilaksanakan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.841.838.894,-** dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran sebagai berikut :

I.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.	27.368.500,-
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	9.893.500,-
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2.349.000,-
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	2.271.000,-
d.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp.	8.186.000,-
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.669.000,-
II.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.	1.800.283.492,-
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.793.141.492,-
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	4.321.000,-
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	2.821.000,-
III.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp.	40.889.080,-
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Rp.	40.889.080,-
VI.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp.	395.637.500,-
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	1.707.000,-
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	31.595.000,-
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Rp.	8.732.500,-

	Penggandaan		
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	353.603.000,-
V.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	513.469.322,-
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	4.000.000,-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	35.500.906,-
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	473.968.416,-
VI.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	64.191.000,-
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	64.191.000,-

Dari total anggaran yang ada di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebesar **Rp. 2.841..838.894,-** total realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	9.893.500,-	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Rp.	400.000,-	17,61%
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	359.662.625,-	20,05%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.	2.098.000,-	6,64%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	2.850.000,-	32,63%
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	45.908.000,-	12,98%
7.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	63.783.210,-	13,45%
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	500.000,-	12,5%

9.	Penyediaan Jasa Komunikas, sumberdaya dan listrik	Rp.	7.957.440,-	22,41%
10	Penyediaan jasa pemeliharaan., biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	12.973.000	20,2%
JUMLAH REALISASI		Rp.	506.025.775,-	17,80%

2. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.

Anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan. untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 40.292.133.000,-** dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran sebagai berikut :

I.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK.	Rp.	40.232.583.000-
a.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Rp.	40.232.583.000-
II.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Rp.	59.550.000,-
a.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp.	59.550.000,-

Dari total anggaran yang ada di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebesar **Rp. 40.292.133.000,-** bahwa belum ada realisasi kegiatan yang dicapai (0%)

mengingat pelaksanaan kegiatan masih dalam penjadwalan dan tahap persiapan.

3. Bidang Kesatuan Bangsa.

Anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa. untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 791.317.450,-** dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran sebagai berikut :

I.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.	609.190.450,-
a.	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	609.190.450-
II.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp.	29.080.500,-
a.	Pelaksanaan kebijakan di bldang ketahanan ekonomi, sosial, budaya , dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Rp.	29.080.500-
III.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.	153.046.500,-
a.	Pelaksanaan kebijakan di bldang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Rp.	30.060.500-
b.	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Rp.	122.986.000,-

Belum ada realisasi kegiatan yang dicapai (0%) di Bidang Kesatuan Bangsa pada

triwulan 1, mengingat pelaksanaan kegiatan masih dalam penjadwalan dan tahap persiapan.

Selanjutnya arahan Bapak Kepala Badan agar semua Bidang melaksanakan kegiatan yang telah dijabarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan semua Bidang agar membuat Rencana Aksi terhadap kegiatannya yang telah ditetapkan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

B. Kendala / Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya : Kurang efektif pelaksanaan kegiatan di Bidang-Bidang sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah melakukan rapat evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana.

D. Motivasi / Inovasi

Dalam mengatasi kendala diatas maka OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan optimalisasi dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan program dan penyerapan Anggaran bisa tercukupi sampai dengan akhir tahun anggaran.

E. Kesimpulan

Mengacu pada hal – hal tersebut diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Badan sampai dengan tingkat Eselon III dan perlu di tingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
NIP. 19710219 199101 1 003

**MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN PROGRAM KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

NAMA SKPD / OPD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KODE	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Unsur Pemerintahan Umum	43..925.289.344	554.641.275	100%	1,3%		
801	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
801	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.841.838.894	506.025.775	100%	18%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan ke I belum mencapai target, agar lebih dioptimalkan pada triwulan II, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.368.500	10.293.500	100%	38%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke I lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	1.800.283.492	359.662.625	100%	20%	Kegiatan telah sesuai dengan target sampai dengan triwulan I pada Renja 2024, agar terus dipertahankan dan ditingkatkan.	
	03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	40.889.080	0	100%	0%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke I lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya

		04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.637.500	50.856.000	100%	13%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke II lebih dioptimalkan, sehingga dapat	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan
--	--	----	------------------------------------	-------------	------------	------	-----	--	---

KODE	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
						memenuhi target yang telah ditetapkan.	dengan yang lainnya	
	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	513.469.322	72.240.650	100%	14,06%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke II lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	64.191.000	12.973.000	100%	20%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke II lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	609.190.450	48.615.500	100%	7.98%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	
	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	609.190.450	48.615.500	100%	7,98%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	
	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	40.232.583.00	0	100%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan ke I belum mencapai target, agar lebih dioptimalkan pada triwulan II, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	40.232.583.00	0	100%	0%	Pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan ke I belum mencapai target, agar lebih dioptimalkan pada triwulan II, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	

		dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik					
	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	59.550.000	0	100%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.
	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	59.550.000	0	100%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.

KODE	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	29.080,500	0	100%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.
	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29.080.500	0	100%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.
	02	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	55.000.000	0	45%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan III segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.
	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.4000.000	0	45%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.
	01	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.4000.000	0	45%	0%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.

			JUMLAH	8.439.906.700	4.011.711.267		48%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan, agar pada triwulan II segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--	------------	---	--

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
NIP. 19710219 199101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK

Jalan Antasari Nomor 2 Putussibau Kode Pos 78716

Telp. (0567) 21033 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 03 April 2024

Nomor : 000.1/ 61 /BKBP/SET
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. Kepada

1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Seluruh PNS dan Tekon Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di -

Putussibau

Dengan hormat dimohon kehadirannya Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rapat “ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I “ yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 04 April 2024
Pukul : 09.00 WIB – sampai dengan selesai
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Acara : Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan I

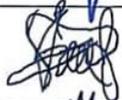
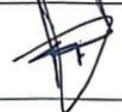
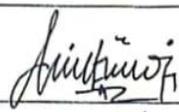
Demikian undangan ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
NIP. 19710219 199101 1 003

**DAFTAR HADIR
MONITORING EVALUASI KINERJA TRIWULAN I**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P	KEPALA BADAN	
2.	ACHMAD WAHYU HABIBIE, S.IP	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
3.	MARYANI ASYURI, S.E	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
4.	SRY JULIANA, S.E, M.A.P	PENATA LAPORAN KEUANGAN	
5.	SYAPARIDA MARLINA, S.E	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
6.	RATNA ISMAWATI, S.S.T	BENDAHARA	
7.	IFRIYALDI, S.Pd	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
8.	NENENG LUSIANA	PENGADMINISTRASI UMUM	
9.	HANIK NURHAYATI	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	
10.	MUHAMAD RAHYUNI	PENGADMINISTRASI UMUM	
11.	AYU NOVITA, A.Md.P	ARSIPARIS TERAMPIL	
12.	SUMARNI MAWARTI, A.Md.A.B	ARSIPARIS TERAMPIL	
13.	FLAVIANA ANASTASIA UTA, S.E	TENAGA KONTRAK	

14.	EKO ROBBYANTO SUWAKA, S.E	TENAGA KONTRAK	
15.	BELLA NUZULUL RACHMI, S.E	TENAGA KONTRAK	
16.	ALBERTUS PIGRAHAR TOMMY	TENAGA KONTRAK	
17.	ZUMARIYAH	TENAGA KONTRAK	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197102191991011003

FOTO KEGIATAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK

Jalan Antasari Nomor 2 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21033 Fax. (0567) 21397

NOTULENSI
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peserta : Pejabat Struktural , Pejabat Fungsional, PNS dan Tekon di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Triwulan I

Hasil : 1. Beberapa Sub Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 yang kinerja maupun realisasinya masih rendah bahkan masih 0%. Hal tersebut dikarenakan masih belum dilaksanakannya sub kegiatan tersebut. Dan juga ada pelaksanaannya masih belum maksimal, Jumlah Sub kegiatannya yang kinerja dan realisasinya masih rendah ada 11 (Sebelas) Sub Kegiatan dari 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang ada di DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Tahun Anggaran Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 Triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah terealisasi adalah sebesar **Rp. 506.025.775,- (17,80%)** dengan rincian sebagai berikut :

Dengan rincian sebagai berikut :

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	. 9.893.500,-	
	Rp.	100%
➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 400.000,-	17,61%
➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 359.662.625	20,05%

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.098.000,-	6,64%
➤ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 2.850.000,-	32,63% 13%
➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 45.908.000,-	12,5%
➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 500.000,-	
➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 7.957.440,-	22,5%
➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	13,5%
➤ Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 63.783.210,- Rp. 12.973.000,-	20,21%
➤ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 48.615.500,-	8,00%

Jumlah Realisasi

Rp. 506.025.775,- 17,80%

Agar target bisa tercapai akan dilakukan :

- a. Lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara yang direncanakan dengan yang realisasi.
- b. Penetapan target kinerja dan penyerapan anggaran pada perencanaan berikutnya dapat disesuaikan dengan rencana pelaksanaannya serta mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai RENJA.
- c. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap Triwulan sebagai bahan evaluasi berikutnya.



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

